



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 DPRD KOTA YOGYAKARTA

Bapemperda Pastikan Kinerja Legislasi 2025 Optimal



YOGYA (KR) - Kinerja legislasi DPRD Kota Yogyakarta menunjukkan capaian signifikan di penghujung tahun anggaran. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta memastikan Propemperda tahun 2025 akan tuntas 100 persen. Target ini mencakup pembahasan total 12 produk hukum daerah yang krusial bagi tata kelola dan kesejahteraan masyarakat Kota Pelajar.



KR-Ardhi Wahdan

Sidang Paripurna sebagai rapat tertinggi di DPRD Kota Yogyakarta.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandani menegaskan komitmen ini adalah wujud tanggung jawab dewan dalam melahirkan regulasi yang adaptif dan menjawab kebutuhan zaman. "Kami dapat memastikan bahwa seluruh target dalam Propemperda 2025, yang berjumlah 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), akan kami tuntaskan sesuai jadwal. Ini adalah hasil kerja keras dan sinergi antara dewan, khususnya Bapemperda dan Pansus, dengan pihak eksekutif, ujarnya.

Dari 12 target Propemperda tersebut, tiga produk hukum di antaranya merupakan inisiatif lembaga dewan. Sedangkan sisanya merupakan inisiatif eksekutif atau Pemkot Yogyakarta, termasuk tiga produk hukum wajib yang meliputi anggaran mumi, anggaran perubahan dan laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah.

Ipung menjabarkan dari 12 Raperda yang dibahas sepanjang tahun 2025, Bapemperda mencatat saat ini mayoritas sudah berada di tahap akhir. Hanya menyisakan dua raperda yang masih intensif dibahas melalui Pansus. Kedua raperda tersebut adalah terkait rumah susun dan pengelolaan kebudayaan. Pembahasan Raperda Rumah Susun ini sangat vital mengingat tantangan keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta. Pansus Raperda Rumah Susun berfokus pada penyediaan hunian vertikal yang layak dan terjangkau, termasuk memastikan alokasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan rumah susun bagi para penghuni.

Sedangkan Raperda Penyelenggaraan Kebudayaan menjadi payung hukum yang sangat penting bagi Kota Yogyakarta, terutama pasca penetapan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia UNESCO. Raperda ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal, serta menata kawasan cagar budaya yang mencakup lebih dari 45 persen wilayah kota. "Kedua Pansus ini yang berpacu dengan waktu. Meski tim Pansus baru dibentuk pekan kemarin namun ditargetkan segera menyelesaikan substansi Raperda agar dapat dibawa ke tahapan harmonisasi dan Paripurna penetapan. Paling tidak pada akhir November sudah bisa ditetapkan. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama dan kami akan kami paparkan."

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, menyebutkan raperda lainnya dilaporkan tinggal menjalani proses finalisasi dan administrasi akhir. Salah satunya adalah raperda terkait minuman oplosan atau beraikoyakarta periode sebelumnya, raperda tersebut sem-

nya, raperda tersebut sem-

da itu kembali menjadi sorotan publik hingga akhirnya bisa terbahas di tahun ini. "Alhamdulillah raperda itu bisa dilakukan percepatan. Jadi tidak hanya minuman oplosan yang dilarang, tetapi peredaran miras juga turut dikendalikan dan diawasi. Tinggal finalisasi untuk kemudian diputuskan bersama," terangnya.

Menurutnya, maraknya peredaran miras kala itu lantaran akses perizinan yang sangat mudah melalui sistem online single submission (OSS). Akan tetapi dalam regulasi yang baru nanti, meski sudah mengantongi OSS namun wajib memproses izin di wali kota untuk bisa engedarkan ke masyarakat. Tempat untuk penjualan serta kelas atau kadar alkohol juga dibatasi. Termasuk tidak bisa menjual secara daring maupun mengecer di toko-toko kecil melainkan harus sejenis bar dan lain sebagainya. Sedangkan minuman oplosan

maka penagakannya akan lebih optimal," tandasnya.

Selain itu, imbuh Widodo, sejumlah raperda lain juga sudah siap untuk ditetapkan melalui Paripurna. Di antaranya terkait kesejahteraan lansia, keolahragaan, pajak dan retribusi daerah serta lainnya.

Propemperda 2025 ini juga menunjukkan peran aktif DPRD Kota Yogyakarta sebagai lembaga pembuat undang-undang. Dari total 12 Raperda yang dibahas, tiga di antaranya merupakan raperda inisiatif legislatif. Raperda inisiatif ini membuktikan bahwa dewan tidak hanya menunggu usulan dan eksekutif, tetapi juga proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya menjadi produk hukum daerah. Raperda Inisiatif ini umumnya menyentuh isu-isu strategis yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan warga dan penguatan otonomi daerah. "Propemperda yang tuntas 100 persen bukan hanya angka, melainkan kepastian hukum bagi masyarakat. Ketika raperda disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), maka Kota Yogyakarta memiliki instrumen hukum yang baru dan kuat untuk menyelesaikan masalah perumahan, melestarikan budaya, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan," tegas Widodo.

Capaian tuntas 100 persen juga menjadi modal penting bagi DPRD Kota Yogyakarta. Sesuai ketentuan, keberhasilan penuntasan Propemperda di tahun ini memungkinkan dewan untuk menambah target produk hukum hingga 25 persen pada tahun berikutnya, menjamin bahwa agenda legislasi di Kota Yogyakarta akan terus berjalan dinamis dan produktif. (DHI)



KR-Ardhi Wahdan

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandani.



KR-Ardhi Wahdan

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo.

pat masuk dalam target namun akhirnya ditangguhkan seiring dinamika politik. Setelah ada dua warga Kota Yogyakarta yang meninggal dunia akibat minuman oplosan pada tahun lalu, raper-

yang selama ini kerap merenggut korban jiwa, secara jelas dilarang diperjualbelikan. "Semangatnya ialah pengawasan dan pengendalian. Tentu kalau sudah ada payung hukum,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005